

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA KNIL DENGAN APRIS DI SULAWESI SELATAN PADA TAHUN 1947 - 1950

Denny Aditian

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

Email: tiyanadit@gmail.com

Kuswono

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

Email: kuswono@ummetro.ac.id

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis perjuangan Bangsa Indonesia dalam melawan penjajah yang terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun 1950. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah heuristik dan teknik kepustakaan dan keabsahan pengumpulan data menggunakan kritik intern dan ekstern dengan langkah-langkah analisisnya yakni menggunakan langkah interpretasi dan historiografi. Hasil analisis penelitian ini adalah: Upaya Penyelesaian Konflik Antara KNIL Dengan APRIS Di Sulawesi Selatan. Adalah dengan cara Diplomasi yang berpihak pada Indonesia.

Kata Kunci: Penyelesaian Konflik, KNIL, APRIS, Sulawesi Selatan

PENDAHULUAN

Usai Penyerahan Kedaulatan (*Souvereniteit Overdracht*) pada tanggal 27 Desember 1949, dalam negeri Republik Indonesia Serikat mulai bergelora. Serpihan ledakan bom waktu peninggalan Belanda mulai menunjukkan akibatnya. Pada umumnya serpihan tersebut mengisyaratkan tiga hal. Pertama, ketakutan antek tentara Belanda yang tergabung dalam KNIL, yang bertanya-tanya akan bagaimana nasib mereka setelah penyerahan kedaulatan tersebut. Kedua, terperangkapnya para pimpinan tentara yang jumlahnya cukup banyak dalam penentuan sikap dan ideologi mereka. Utamanya para pimpinan militer didikan dan binaan Belanda. Terakhir masih banyaknya terjadi dualisme kepemimpinan dalam kelompok ketentaraan Indonesia antara kelompok APRIS dengan kelompok pejuang gerilya (Rushdy Hoessein, 2006).

Walaupun sejak bulan Juni 1947 Pemerintah RI telah mengeluarkan kebijaksanaan bahwa segenap badan kelaskaran baik yang tergabung dalam biro perjuangan maupun yang lepas berada dalam satu wadah dan satu komando yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) hal ini seperti yang dikutip dalam Sartono Kartodirjo (1992:44) yang berbunyi :

Ketiga hal tersebut semakin mengental pada daerah yang masih kuat pengaruh "Belandanya". Salah satu daerah dimaksud adalah wilayah Sulawesi Selatan.

Tiga peristiwa di tahun 50 yang terjadi di kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan memperlihatkan kekentalan tersebut.

Dari kutipan di atas kiranya dapat diambil pengertian bahwa peristiwa pertama terjadi pada tanggal 5 April 1950 yang terkenal sebagai peristiwa Andi Aziz. Peristiwa kedua yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1950 dan ketiga yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 1950. Dalam ketiga peristiwa tersebut yang menjadi penyebabnya selalu permasalahan mengenai kegamangan tentara KNIL akan nasib mereka. Sedangkan 2 peristiwa terakhir menjadi tolak ukur dari kegamangan tersebut. Menteri Pertahanan RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam pertemuan pers mengatakan bahwa tidak heran dengan terjadinya peristiwa paling akhir pada tanggal Agustus 1950.

Rentetan ketiga peristiwa di Makassar tersebut agaknya selalu bermula dari upaya-upaya para anggota KNIL (kemudian dilebur dalam KL) untuk mengacaukan kehidupan rakyat di Makassar sekaligus berupaya untuk memancing tentara APRIS memulai serangan kepada mereka. Tidak kalah ikut menentukan suasana panas di kota Makassar adalah persoalan tuntutan masyarakat untuk segera menuju negara kesatuan. Tentu saja gerakan rakyat ini tidak saja terjadi di Indonesia Timur, tapi juga di Jawa Timur, Pasundan, Sumatera Timur dan berbagai daerah lainnya. Pemerintah RIS dalam hal ini atau setidaknya banyak pihak dalam Kabinet dan Parlemen sangat memberi angin menuju Negara Kesatuan.

Andi Aziz sendiri diyakini banyak pihak adalah seorang anggota militer dengan pribadi yang baik. Namun dalam skala kesatuan militer KNIL di Sulawesi Selatan dirinya lebih condong sebagai boneka. Tampak bahwa Kolonel *Schothorg* dan jaksagagung NIT Sumokil adalah pengendali utama kekuatan KNIL di kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan Aziz dalam sidang militer yang digelar tiga tahun kemudian (1953), saksi mantan Presiden NIT Sukawati dan Let. Kol Mokoginta tidak banyak meringankan terdakwa yang pada akhirnya dihukum penjara selama 14 tahun, seperti yang dikutip dalam Miriam Budiarjo (2005:296) menyatakan bahwa:

Persidangan tersebut terdakwa mengaku bersalah, tidak akan naik apel tapi merencanakan minta grasi kepada Presiden. Ketika sedang berlangsungnya pemberontakan Andi Aziz di Makassar, untuk mengantisipasi Pemerintah RIS di Jakarta telah membentuk pasukan gabungan Expedisi Indonesia Timur.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa pasukan ini terdiri dari batalyon ADRI dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur didukung oleh AURIS,

ALRIS dan Kepolisian. Meskipun Worang tidak dapat langsung mendarat di Makassar tapi di Jeneponto yang letaknya 100 km keselatan, rakyat menyambutnya dengan sukacita. Sebuah foto yang disiarkan majalah Merdeka terbitan 13 Mei 1950 menggambarkan hal tersebut. Terlihat 3 orang anggota tentara APRIS.

Pertempuran besar memang tidak terjadi antara pasukan APRIS Worang dengan KNIL di Makassar bahkan Andi Aziz akhirnya mau menyerah guna memenuhi panggilan Pemerintah Pusat di Jakarta meskipun telah melampaui batas waktu 4 X 24 Jam untuk mendapat pengampunan. Setelah Andi Aziz menyerah, banyak tentara dari bekas infantri KNIL yang tidak tahu lagi siapa pemimpin mereka dan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Sementara untuk bergabung dengan APRIS belum ada ketentuan karena belum ada peraturan resmi yang akan membubarkan KNIL (KNIL bubar tgl 27 Juli 1950). Tak heran mereka kemudian memprovokasi rakyat dan kemudian memulai serangan terhadap pos-pos tentara APRIS. Menjelang pertempuran yang terjadi antara pasukan KNIL dengan pasukan APRIS pada tanggal 15 Mei 1950 bermula ketika banyak anggota KNIL menurunkan bendera merah putih disekitar kampemen tempat anggota KNIL berdiam. Peristiwa penurunan bendera Sang Saka Merah Putih itu terjadi bersamaan dengan tibanya Presiden RIS Soekarno dikota Makassar yang memulai lawatannya ke Sulawesi. Setelah Merah Putih diturunkan berlanjut dengan coretan tembok rumah rakyat dan spanduk disekitar kampemen KNIL berisi tulisan yang memojokkan Negara Republik Indonesia Serikat. Yusmar Basri (1992:221) menyatakan bahwa:

Peristiwa ini juga kemudian berkaitan dengan ditembaknya seorang Perwira APRIS oleh tentara KNIL. Peristiwa diatas memicu ketegangan yang memunculkan ketidak sabaran anggota APRIS terhadap tindakan dan ulah provokasi KNIL.

Berdasarkan kutipan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pasukan pejuang gerilya dibawah batalyon Lipang Bajeng dan Harimau Indonesia telah mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Sementara tentara KNIL sudah semakin mengeras upayanya untuk menghancurkan kekuatan APRIS untuk menguasai Makassar. Maka pada tanggal 15 Mei 1950 terjadilah pertempuran besar dikota Makassar. Pasukan KNIL menyerbu barak-barak APRIS, membakar rumah rakyat, menghancurkan rumah dan toko-toko didaerah pecinaan.

Sekitar Makassar penuh dengan api, bau anyir darah dan berbagai desing senjata. Serangan KNIL ini memang sudah diwaspadai APRIS. Tentara APRIS kemudian membalas serangan dan bersamaan dengan itu pasukan pejoang gerilya dari Batalyon Lipang Bajeng dan Harimau Indonesia telah turun dari dua kota pangkalan mereka di Polobangkeng dan Pallangga yang terletak disekitar kota Makassar. Seketika suasana medan laga telah berubah. Pasukan APRIS bersama dua batalyon pejoang tersebut dan rakyat Makassar menyerang balik tentara KNIL.

Dalam keadaan demikian inilah Kolonel AH Nasution selaku Kepala Staf ADRIS bersama dengan Kolonel Pereira selaku Wakil Kepala Staf KNIL tiba di Makassar. Kedua pucuk pimpinan tentara ini kemudian meninjau keadaan dan berunding. Pada tgl 18 Mei 1950 wakil dari APRIS yaitu Overste Sentot Iskandardinata dan Kapten Leo Lopolisa berunding dengan wakil dari KNIL yaitu Kolonel Scotborg, Overste Musch dan Overste Theyman yang disaksikan oleh Kolonel AH Nasution serta Kolonel AJA Pereira.

Perundingan menghasilkan dua keputusan penting yaitu dibuatnya garis demarkasi serta tidak diperbolehkannya kedua tentara APRIS dan KNIL untuk mendekati dalam jarak 50 meter. Untuk sementara keadaan dapat diamankan. Perundingan pertama ini detailnya menghasilkan persetujuan untuk melokalisir tentara KNIL ditiga tempat. Namun rupanya persetujuan dimaksud tidak ditaati, antara menerangkannya sebagai berikut "Tetapi persetujuan tinggal persetujuan. Maka pada hari selasa pertempuran mulai lagi berjalan dengan sengit. Pertempuran yang paling sengit terjadi diempat tempat. Yaitu tangsi KNIL di Mariso, sekitar tangsi KNIL Matoangin, Boomstraat, sekitar Stafkwartier KNIL di Hogepad. Pertempuran sudah berjalan tiga hari tiga malam lamanya tetapi belum juga berhenti". Pada akhir Juli 1950 pasukan KNIL dibubarkan. Muncul permasalahan baru mau dikemanakan para prajurit ex KNIL tersebut. Sebagian memang dilebur kedalam KL, sebagian lagi menunggu untuk diterima sebagai anggota APRIS. Namun masa penantian ini secara psikologis amat merisaukan para anggota tentara KNIL. Pertama mereka dianggap rakyat sebagai kaki tangan Kolonial Belanda, sementara disisi lain bekas majikannya tidak mengindahkan nasib mereka. Timbullah usaha provokasi baru yang antara lain dilukiskan Satono, Kartodirjo (1992:176) sebagai berikut:

Sesudah anggota KNIL di Makassar memperoleh kedudukan sementara sebagai anggota KL pada tanggal 26 Juli 1950 keadaan tidak bertambah baik,

sebaliknya mereka terus menerus menimbulkan kesulitan-kesulitan. Mereka antara lain menentang dengan kekerasan usaha pimpinan tentara Belanda untuk menyerahkan alat tentaranya kepada tentara Belanda. Mereka sering menganiaya penduduk.

Berdasarkan kutipan di atas disimpulkan bahwa bendera-bendera kebangsaan (maksudnya Merah Putih) disekitar kampemen mereka turunkan dan akhir-akhir ini mereka dengan kejam membunuh perwira Indonesia yang bereda dekat kampemen ketika sedang mengunjungi keluarganya (Antara 12/8/1950). Berbagai tindakan provokasi yang dilakukan para eks KNIL ternyata tidak mendapat tanggapan emosional oleh APRIS. Sehingga terkesan APRIS terlalu sabar. Kesan sabar ini tertimpakan pada pucuk pimpinan APRIS Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur Kolonel AE Kawilarang. Suhartono (1994: 93) menyatakan bahwa:

Kemaren jam 17.00 Kawilarang telah mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil partai dan organisasi di Makassar. Kami cukup kuat dan pasti dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan senjata tetapi dengan demikian keadaan akan bertambah kacau dan nama negara kita dimata dunia akan surut. (Antara 3/6/1950). Dua hal yang antagonis antara provokasi yang dilakukan tentara KNIL dan kesabaran pucuk pimpinan APRIS tersebut menimbulkan dilema dalam menetapkan kebijaksanaan yang akan diambil APRIS.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa rakyat Makassar semakin mempertajam sikap mereka terhadap tentara KNIL dengan melakukan pemboikotan seluruh kegiatan perdagangan dari dan ke markas-markas KNIL. Suasana tegang ini ibarat bisul yang akan meletus sewaktu-waktu, agar APRIS tidak keliru mengambil langkah dalam mengantisipasi ketegangan yang semakin tinggi pada tgl 5 Agustus 1950, APRIS setuju untuk mengadakan perundingan dengan wakil militer Belanda di Indonesia.

Pertemuan yang diikuti oleh tiga wakil tentara Belanda dan dihadiri pula oleh wakil dari UNCI, menyepakati sikap untuk mengendurkan ketegangan melalui APRIS yang berjanji akan mengadakan pendekatan kepada rakyat agar menghentikan boikot kepada tentara KNIL. Belum upaya mengendurkan itu dilakukan oleh APRIS, hari itu pula pada pukul 17.20 selang 80 menit dari usainya persetujuan tersebut tentara eks KNIL melakukan serangan sistematis keseluruhan barak dan asrama tentara APRIS. Tindakan yang kelewat batas tersebut dan mengkhianati persetujuan, pantang ditolak

oleh segenap pasukan APRIS, pejuang gerilya yang tergabung dalam divisi Hasanudin serta rakyat Makassar.

Dalam tempo sekejap memang tentara eks KNIL dapat menguasai medan pertempuran. Pasukan APRIS yang didukung oleh kekuatan Udara dan Laut menghantam terus menerus barak-barak eks tentara KNIL. Akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1950 bertempat dilapangan terbang Mandai diadakan persetujuan antara Kolonel AE Kawilarang yang mewakili APRIS dan Mayor Jendeal Scheffrelaar sebagai wakil Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia. Mereka sepakat agar seluruh anggota pasukan KL meninggalkan Makassar dan menyerahkan seluruh perlengkapannya kepada APRIS. Bagi mereka yang menolak akan dikeluarkan dari KL. Walau bagaimanapun tentara kita pernah jaya dan akan tetap jaya untuk selamalamanya, seperti yang dikutip dalam Maulwi Saelan (2008:109) menyatakan bahwa:

Hal ini antara lain disebabkan karena pucuk pimpinannya sangat cermat dan memiliki kewaspadaan serta kedalaman berfikir dalam mengatur strategi. Sementara Perjanjian Linggarjati sedang berlangsung, di daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera, tetap terjadi perlawanan sengit dari rakyat setempat. Walaupun banyak pemimpin mereka ditangkap dibuang dan bahkan dibunuh, perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan tidak kunjung padam.

Dari kutipan di atas diketahui bahwa hampir setiap malam terjadi serangan dan penembakan terhadap pos-pos pertahanan tentara Belanda. Para pejabat Belanda sudah sangat kewalahan, karena tentara KNIL yang sejak bulan Juli menggantikan tentara Australia, tidak sanggup mengatasi gencarnya serangan-serangan pendukung Republik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian historis atau metode sejarah. Metode penelitian sejarah artinya jalan, cara, atau petunjuk teknis dalam melakukan proses penelitian. Metode sejarah, seperti yang dinyatakan oleh Nugroho Notosusanto (1984 : 10-11) bahwa metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesis dari pada hasil-hasilnya biasanya dalam bentuk tulisan.

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu cara atau langkah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Cara dan langkah tersebut disebut sebagai metode. Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk penyelesaian masalah serta untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos* yang berarti cara atau jalan. Sedangkan dalam bahasa Arab metode dapat disebut *Thariqah* yang berarti langkah-langkah dalam mempersiapkan suatu pekerjaan. Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung. Jika dipandang dari bentuk pendekatan dan subjek penelitian, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian tinjauan pustaka. Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pustaka dengan mengadakan studi kepustakaan. Seperti yang dijelaskan oleh Nazir (1988: 111) bahwa Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji.

BAGIAN INTI

Seperti negara-negara yang lain Indonesia (masa penjajahan) atau Hindia-Belanda juga menginginkan Negeranya mempunyai bentuk pemerintahan yang sama seperti negara lain, semua itu secara perlahan baru terwujud setelah adanya perubahan peraturan seperti yang dikutip dari sebuah situs berbunyi: KNIL adalah serdadu belanda yang terdiri dari orang-orang belanda, tentara bayaran dan sewaan dari negara lain serta warga pribumi (Indonesia) yang ditugaskan di wilayah hindia timur (Indonesia) pada zaman VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Orang Indonesia menyebutnya tentara kompeni atau kumpeni. Pada tahun 1830 belanda membentuk satuan khusus angkatan perang yang tangguh untuk ditugaskan di wilayah hindia belanda (Indonesia) dan dinamakan *Oost-Indische Leger* (tentara hindia timur).

Belanda mengontrak orang-orang mantan serdadu disersi dari eropa seperti Jerman, Belgia, Swiss, Perancis serta orang-orang Afrika barat (Ghana) untuk dijadikan serdadu yang handal di wilayah jajahan hindiatimur. Selanjutnya pada tahun 1836 raja Willem I memberikan predikat koninklijk untuk kesatuan tentara hindia timur ini, namun predikat tersebut tidak pernah digunakan selama satu abad. Kemudian pada tahun 1933 barulah tentara hindia timur ini secara resmi dinamakan Koninklijk Nederlands Indihsce

Legeryang disingkat KNIL.
(http://rizam_history.student.blogspot.com/ .diakses 1 Februari 2013).

Dari kutipan diatas kiranya dapat diambil pengertian bahwa pada tahun 1936 jumlah serdadu KNIL yang berasal dari warga pribumi meningkat hingga 71% dari seluruh anggota serdadu KNIL, seperti yang dikutip dalam A.H. Nasution (1983:68) yaitu:

Mereka adalah orang ambon sebanyak 4000 orang, manado sebanyak 5000 orang jawa sebanyak 13.000 orang. Total jumlah serdadu pribumi pada tahun itu adalah 30.000 orang. Kemudian pada tanggal 27 desember 1949 belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar di Den Haag. Akhirnya pada tanggal 20 juli 1950 kerajaan belanda memutuskan KNIL untuk dibubarkan.

Berdasarkan kutipan di atas diketahui bahwa selanjutnya pada tanggal 26 juli 1950 jam 00.00, KNIL resmi dibubarkan setelah bertugas di Indonesia selama 120 tahun. Mantan tentara KNIL yang berasal dari warga pribumi waktu itu jumlahnya sekitar 60.000 orang. Meskipun KNIL melayani pemerintahan Hindia-Belanda, banyak di antara anggota-anggotanya yang adalah penduduk bumiputra di Hindia-Belanda dan orang-orang Indo-Belanda, bukan orang-orang Belanda. Di antara mereka yang pernah menjadi anggota KNIL pada saat menjelang kemerdekaan adalah Mangkunegara VII, Sultan Hamid II, Oerip Soemohardjo, E. Kawilarang, A.H. Nasution, Gatot Soebroto dan T.B. Simatupang serta tentu saja Muhammad Suharto, yang kelak memegang peranan penting dalam pengembangan dan kepemimpinan di dalam angkatan bersenjata Indonesia. Ketika berlangsung Perang Diponegoro, pada tahun 1826-1827 pemerintah Hindia Belanda membentuk satu pasukan khusus.

Sartono Kartodirjo(1992 : 45) menyatakan bahwa:

Setelah Perang Diponegoro usai, pada 4 Desember 1830 Gubernur Jenderl van den Bosch mengeluarkan keputusan yang dinamakan "*Algemeene Orders voor het Nederlandsch-Oost-Indische leger*" di mana ditetapkan pembentukan suatu organisasi ketentaraan yang baru untuk Hindia-Belanda, yaitu *Oost-Indische Leger* (Tentara India Timur) dan pada tahun 1836, atas saran dari Raja Willem I, tentara ini mendapat predikat "Koninklijk".

Dari kutipan diatas kiranya dapat diambil pengertian bahwa dalam penggunaan sehari-hari, kata ini tidak pernah digunakan selama sekitar satu abad, dan baru tahun 1933, ketika Hendrik Colijn -yang juga pernah bertugas sebagai perwira di

Oost-Indische Leger- menjadi Perdana Menteri, secara resmi tentara di India-Belanda dinamakan Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, disingkat KNIL. Undang-Undang Belanda tidak mengizinkan para wajib militer untuk ditempatkan di wilayah jajahan, sehingga tentara di Hindia Belanda hanya terdiri dari prajurit bayaran atau sewaan.

Kebanyakan mereka berasal dari Perancis, Jerman, Belgia dan Swiss. Tidak sedikit dari mereka yang adalah desertir dari pasukan-pasukannya untuk menghindari hukuman. Namun juga tentara Belanda yang melanggar peraturan di Belanda diberikan pilihan, menjalani hukuman penjara atau bertugas di Hindia Belanda. Mereka mendapat gaji bulanan yang besar. Tahun 1870 misalnya, seorang serdadu menerima f 300,-, atau setara dengan penghasilan seorang buruh selama satu tahun. Dari catatan tahun 1830, terlihat perbandingan jumlah perwira, bintara serta prajurit antara bangsa Eropa dan pribumi dalam dinas ketentaraan Belanda. Di tingkat perwira, jumlah pribumi hanya sekitar 5% dari seluruh perwira sedangkan di tingkat bintara dan prajurit, jumlah orang pribumi lebih banyak daripada jumlah bintara dan prajurit orang Eropa, yaitu sekitar 60%.

Kekuatan tentara Belanda tahun 1830, setelah selesai Perang Diponegoro adalah 603 perwira bangsa Eropa, 37 perwira pribumi, 5.699 bintara dan prajurit bangsa Eropa, 7.206 bintara dan prajurit pribumi, seperti yang dikutip dalam J.B. Soedarmanta (2011:117) yaitu :

Tahun 1936, jumlah pribumi yang menjadi serdadu KNIL mencapai 33 ribu orang, atau sekitar 71% dari keseluruhan tentara KNIL, di antaranya terdapat sekitar 4.000 orang Ambon, 5.000 orang Manado dan 13.000 orang Jawa. Apabila meneliti jumlah perwira, bintara serta prajurit yang murni orang Belanda terlihat, bahwa sebenarnya jumlah mereka sangat kecil.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pribumi yang mencapai pangkat tertinggi di KNIL adalah Kolonel KNIL Abdoelkadir Widjoatmodjo, yang tahun 1947 memimpin delegasi Belanda dalam perundingan di atas kapal perang AS Renville, yang membuahkan Persetujuan Renville. Seorang Indonesia, Sultan Hamid II dari Pontianak, yang dididik oleh dua wanita Inggris, mencapai pangkat Mayor Jenderal dalam posisi Asisten Politik Ratu Juliana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan melalui analisis data yang telah di kemukakan penulis, maka dapat diambil simpulan historisnya yaitu, dalam bidang militer

peleburan mantan anggota KNIL ke APRIS mempunyai pengaruh yang besar terhadap penyelesaian konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun 1947-1950.

Peristiwa peleburan mantan KNIL ke APRIS, di Negara Indonesia Timur (NIT) ternyata berkembang menjadi masalah serius. Para pemimpin NIT berpendapat bahwa APRIS adalah kesatuan militer yang berdiri sendiri disuatu negara bagian. Pendapat ini sebenarnya mengingkari keputusan hasil konferensi Inter Indonesia bulan Juli 1949. "APRIS adalah Angkatan Perang Nasional, Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi APRIS". Namun para pemimpin NIT menafsirkan lain. Akhirnya setelah Menteri Pertahanan RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertemu dengan Perdana Menteri NIT Anak Agung Gede yang juga Menteri Dalam Negeri RIS, dan Wakil Perdana Menteri NIT Dr. Soumokil, tercapai suatu kesepakatan. Dalam pembentukan APRIS (Angkatan Perang Republic Indonesia Serikat) intinya diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari kalangan bekas anggota Angkatan Perang Belanda. Personil bekas Angkatan Perang Belanda yang akan dilebur kedalam APRIS meliputi sekitar 33.000 orang dengan 30 orang perwira. Pada angkatan udara diserahkan 10.000 orang. Pembentukan APRIS sebagai salah satu keputusan KMB dengan TNI sebagai intinya ternyata telah menimbulkan masalah psikologis.

Penandatanganan KMB 27 Desember 1949 yang menguntungkan pihak Indonesia. Setelah kekalahan dan penyerahan Jepang kepada Sekutu, Belanda tidak membuang begitu saja kesempatan untuk dapat kembali menguasai Indonesia. Dengan pemerintahan sipil Belanda NICA, Belanda mulai menyusuri wilayah-wilayah strategis di Indonesia untuk kemudian mereka jadikan pusat-pusat pemerintahan bagi Belanda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 seolah-olah bukan sebuah tantangan dan hambatan bagi usaha Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia.

Belanda melalui *Netherland Indische Civil Administration* (NICA) berusaha menaklukkan kembali wilayah - wilayah strategis di Indonesia yang sempat jatuh ke tangan pemerintahan pendudukan Jepang. Dengan berbagai propaganda yang dilancarkan kepada pemerintahan Republik Indonesia yang baru merdeka dan dunia Internasional, Belanda sedikit demi sedikit mulai kembali mendapatkan hegemoninya untuk menguasai Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Nasution. (1983). *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid III*. Jakarta: Gunung Agung.
- Egi. 2012. Diktat Sejarah Indonesia Masa. [http: //egi91. blogspot.com /2011/10/diktat-sejarah-indonesia-masa.html](http://egi91.blogspot.com/2011/10/diktat-sejarah-indonesia-masa.html). Diakses tanggal 25 april 2012.
- <http://sejarahkita.blogspot.co.id/2006/04/> diakses pada 17 Juli 2017/
- J.B. Soedarmanta. 2011. *Politik Bermartabat Biografi I. J. Kasimo*. Jakarta: Pustaka Buku Kompas.
- Julius Pour. 2009. *Doorstoot Naar Djokja Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer*. Jakarta: Kompas.
- Marwati., dkk. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia (V) lima. Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Republik Indonesia (1900 – 1942)*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 392-394.
- Maulwi, Saelan. 2008. *Kesaksian Wakil Komandan Tjakarabirawa dari Revolusi 45 sampai kudeta 66*. Jakarta: Visi Media. Hal 147-148
- Miriam Budiarjo,. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT . Gramedia Pustaka Utama.
- Nazir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Notosusanto, Nugroho. 1987. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Rushdy Hoesein. 2006. *Pertempuran Makassar 1950*
- Sartono, Kartodirdjo,. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional. Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 182-183.